

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu negara. Kesejahteraan dapat diukur dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Kedua hal ini merupakan permasalahan pokok yang terjadi jika kesejahteraan tidak tercapai (Musta'anah & Sopingi, 2019). Data tingkat kemiskinan dapat dilihat di BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia memiliki tren menurun hingga tahun 2019.



Gambar 1. Data Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018

Sumber : Website resmi BPS Indonesia

Pada Gambar 1, penduduk miskin yang merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2018 berjumlah 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari jumlah penduduk di Indonesia (Marhaeni, 2018). Walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia memiliki tren menurun setiap tahunnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan lebih cepat.

Dilihat dari sudut pandang dampak yang ditimbulkan, kemiskinan memiliki berbagai dampak buruk, yaitu tingkat pendidikan yang mengalami penurunan, tingkat gaji atau pendapatan yang juga mengalami penyusutan. Kedua dampak ini dapat menimbulkan efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat yang juga berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat di sebuah negara. Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan dialami juga oleh negara berkembang lainnya (Senja et al., 2018).

Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. (Kawatu et al., 2018) menunjukkan pengaruh ZIS (*Zakat, Infak, dan Sodaqoh*) dan anggaran pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial. Selain itu, (Ridwan, 2016) menyatakan bahwa zakat memiliki potensi menggantikan pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih tiga variabel, yaitu ZIS, anggaran pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial, dan pajak. Berikut ini dijelaskan lebih rinci ketiga faktor tersebut.

Dari sudut pandang ZIS, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, sebesar 85,1% Muslim, menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara muslim terbesar di dunia. Syariat Islam memiliki cara untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan ZIS (Ramadhan & Cahyono, 2020). Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan ZIS karena jumlah penduduk Muslim yang besar. Jika semua Muslim Indonesia melaksanakan ZIS, maka akan meningkatkan penghimpunan dana ZIS yang dapat dikelola oleh lembaga Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mengentaskan kemiskinan. (Ramadhan & Cahyono, 2020).

Tabel 1. Daftar penghimpunan dan rasio penyaluran pada Baznas tahun 2015-2019

PENGHIMPUNAN DANA BAZNAS						
Rincian/Deskripsi	Satuan/Unit	2015	2016	2017	2018	2019
Zakat Maal Perorangan	Miliar Rupiah	1,983.4	2,843.7	2,785.2	3,302.2	3,951.1
Zakat Maal Badan	Miliar Rupiah	157.8	620.5	307.0	492.4	306.7
Zakat Fitrah	Miliar Rupiah	168.1	274.0	1,101.9	1,112.6	1,406.1
Infak/Sedekah dan CSR	Miliar Rupiah	1,177.3	1,001.5	1,764.9	2,517.4	3,383.6
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Miliar Rupiah	163.8	277.6	692.9	692.9	1,173.1
Pertumbuhan Pengumpulan	%	10.6	37.5	30.4	30.4	26.0
Rasio Penyaluran/Pengumpulan	%	61.6	58.4	83.8	83.8	84.9
Kategori ACR		Cukup Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Laporan Keuangan Baznas tahun 2019(Baznas, 2019)

Tabel 1 membuktikan bahwa sektor infak dan sedekah memiliki angka yang cukup besar dalam penghimpunan dananya, dimana dana infak dan sedekah, yang berjumlah Rp.3,383.6 Miliar, merupakan dana kedua terbesar setelah dana zakat perorangan yang berjumlah Rp.3,951.1 Miliar. Jika dilihat dari angka pertumbuhan dari tahun 2015 sampai 2019, penghimpunan dana infak dan sedekah Baznas mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp.1,177.3 Miliar menjadi Rp.3,383.6 Miliar (Baznaz, 2019). Dari data tersebut, dapat diartikan bahwa infak dan sedekah berkontribusi sebesar 32% dari total dana yang dihimpun oleh Baznas, sehingga memiliki peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2. Data Distribusi Dana Penghimpun Zakat Baznas Tahun 2015 - 2019

PENYALURAN DANA BAZNAS						
Satuan		Tahun				
Berdasarkan Asnaf	Miliar Rupiah	2015	2016	2017	2018	2019
		1,519.5	2,137.8	3,356.6	3,973.8	4,548.8
Fakir Miskin	Miliar Rupiah	5	6	3	2	8
Amil	Miliar Rupiah	200.8	2019.2	518.6	798.0	640.8
Mualaf	Miliar Rupiah	19.1	17.4	97.2	27.7	38.4
Riqab	Miliar Rupiah	10.6	4.3	21.8	3.0	5.4
Gharimin	Miliar Rupiah	13.3	16.4	40.8	41.1	154.8

Sumber: Statistika Zakat 2019 (Baznas, 2019)

Tabel 2 menunjukkan penyaluran zakat dari Baznas. Zakat yang dialokasikan terhadap fakir miskin ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2015 dari angka Rp.1,519.5 milyar hingga pada tahun 2019 mencapai Rp.4,548.8 Miliar (Baznaz, 2019). Jika dilihat dari distribusi, zakat menjadi yang terbesar diantara 5 variabel lainnya. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia yang

menjadi negara muslim terbesar ini, berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan menggunakan zakat dalam lembaga Baznas. Oleh karena itu, variabel infak dan sedekah merupakan variabel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Dari sudut pandang anggaran pengentasan kemiskinan, Indonesia juga sudah menerapkan sebuah program yang dapat mengatasi tingkat kemiskinan yaitu program KUBe (Kelompok Usaha Bersama). Program ini sudah diimplementasikan di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah fokus untuk mengatasi tingkat kemiskinan melalui Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menggunakan program-program pemberdayaan manusianya seperti bantuan sosial dan pengembangan usaha masyarakat kecil. Hal tersebut membuktikan bahwa ada peluang yang lebih besar di bidang bantuan sosial. Selain dari program KUBe yang dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, Kementerian Sosial juga memiliki unit lain yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia (Kartasmita, 2018).

DPR RI Komisi VII memberikan kebijakan kepada Kementerian Sosial tentang optimalisasi anggaran. anggaran tersebut mendapatkan peningkatan senilai Rp.401,9 Miliar. Hal ini dipicu karena DPR RI melihat tingkat efisiensi belanja non-operasional senilai 200 Miliar Rupiah, bantuan sosial senilai Rp.720 Miliar dan serta program keluarga harapan senilai Rp.419,7 Miliar. Hal ini juga membuktikan bahwa program yang dimiliki Kementerian Sosial memiliki potensi yang cukup baik dalam pengentasan kemiskinan (Anisah Novitarani, 2020).

Selaras dengan arahan Presiden RI, bahwa fakir miskin harus diberdayakan dan dikembangkan, sehingga mereka dapat berkembang dan mandiri dalam membangun keadaanya mencapai keadaan sejahtera (Anisah Novitarani, 2020). Dari arahan Presiden dan keputusan DPR RI yang bertemakan optimalisasi anggaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan bahwa anggaran Kementerian Sosial dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan ini sangat tepat untuk disandingkan dengan dana ZIS dan juga Pajak untuk melihat pengaruh diantara ketiga variabel tersebut.

Dilihat dari sudut pandang pajak, pajak merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah Indonesia. Kenyataannya realisasi pajak di Indonesia tidaklah berujung baik, bahkan mengalami peningkatan yang lambat dan masih tergolong jauh dari target. Pada tahun 2019 target realisasi pajak hanya mencapai Rp. 1.577,56

Triliun atau sekitar 84,4%, sedangkan tingkat realisasinya senilai Rp. 1.332,1 Triliun (Setiawan, 2020). Hal ini membuktikan bahwa sektor pajak memiliki pergerakan yang cukup lambat pada tahun 2019. Jika dilihat tren dari tahun 2018 hingga tahun 2019, maka realisasi pajak memiliki tren yang tidak jauh berbeda.

Tabel 3. Evaluasi Penghimpunan Dana Pajak Di Indonesia Tahun 2013 - 2018

Tahun	Realisasi terhadap Target (%)	Proyeksi terhadap target (%)		Komentar Hasil
		Pesimis	Optimis	
		2013	92,60%	
2014	91,90%	92,50%	94,00%	Berbeda +0,6%
2015	82,00%	82,70%	85,60%	Berbeda +0,7%
2016	81,60%	80,60%	84,20%	Masuk Rentang
2017	89,70%	87,80%	89,20%	Berbeda -0,5%
2018	92,40%	90,70%	92,90%	Masuk Rentang

Sumber : Laporan Kinerja DJP tahun 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi target pajak dari tahun 2013 dengan 92,60% lebih baik dari realisasi pajak tahun 2018 sekitar 92,40%. Hal ini membuktikan adanya tren menurun dalam tingkat realisasi pajak (Setiawan, 2020). Tabel 3 menyimpulkan bahwa pajak memiliki pertumbuhan yang lambat dan juga statis, sehingga besar kemungkinan menimbulkan lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sarjono et al., 2018) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak memiliki potensi yang cukup besar untuk mengentaskan kemiskinan, dikarenakan pajak memiliki pengaruh dengan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Salah satu dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Ramadhan & Cahyono, 2020) dimana memiliki hasil yaitu dana ziswaf masih belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi anggaran pengentasan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Saran yang diajukan juga agar peneliti selanjutnya menambahkan variabel yang berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu pada penelitian ini akan menggunakan variabel tambahan pajak dan menghilangkan wakaf dalam variabelnya (Ramadhan & Cahyono, 2020).

Tetapi jika dilihat dalam penelitian yang dibuat oleh (Setiyowati, 2017), penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dari penelitian yang dibuat oleh (Ramadhan & Cahyono, 2020), dimana dalam penelitian (Setiyowati, 2017) ini mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan juga penyaluran ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqoh, dan Wakaf). Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana dampak dari ZIS terhadap tingkat kemiskinan.

Tidak hanya ZIS saja, menurut penelitian terdahulu yang membahas tentang program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya adalah kebijakan kartu Indonesia, kartu Indonesia pintar, dan juga Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) sehat, dimana program ini tidak berpengaruh secara signifikan (Kawatu et al., 2018). Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh (Ramadhan & Cahyono, 2020) yang menyatakan bahwa dana penanggulangan kemiskinan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kementerian Sosial memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran untuk mendanai program tersebut berasal dari anggaran pemerintah, dan pendapatan negara terbesar adalah melalui pajak. Dilihat dari penelitian terdahulu yang membahas tentang *pengaruh pajak terhadap kemiskinan*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan pajak, bahkan pengaruhnya menyentuh angka 47%. Dan jika diukur dengan pendapatan per kapita maka pengaruhnya adalah positif sekitar 98% (Matitaputty, 2019).

Oleh karena itu pentingnya untuk mengidentifikasi pengaruh dari peningkatan perekonomian yang dipicu oleh variabel ZIS ini dikarenakan pada aktualnya itu sangat berpengaruh terhadap masa lalu, tetapi pada saat ini variabel tersebut seperti kehilangan kemampuan untuk mengembangkan perekonomian dengan indikator tentang pemberantasan kemiskinan. Dilihat dari besarnya pengampunan pajak yang sangat besar ini tidak menutup kemungkinan bahwa alokasi pajak yang benar juga menjadi peluang terbesar bagi pemerintahan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Diharapkan dengan ditelitinya pengaruh tersebut

dapat memaksimalkan variabel ZIS, pajak, dan anggaran pengentasan kemiskinan untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh pajak terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
3. Bagaimana pengaruh anggaran pengentasan kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
4. Bagaimana pengaruh ZIS, Pajak, dan anggaran pengentasan kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh pajak terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh Anggaran pengentasan kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
5. Untuk dapat mengetahui pengaruh ZIS, Pajak, dan anggaran pengentasan kemiskinan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak ditinjau melalui beberapa aspek diantaranya;

1. Aspek teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu dan mendapatkannya untuk penelitian berikutnya atau para penelitian yang akan dilakukan pada masa depan dengan menggunakan judul yang terkait dengan judul ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memaksimalkan peneliti lain dalam pengembangan dan pemaksimalan dalam zakat, Pajak, dan anggaran pengentasan kemiskinan ini terutama dalam mengentaskan permasalahan di masyarakat agar tercapainya status kesejahteraan.

2. Aspek praktis

a. Akademisi

Diharapkan untuk akademisi dapat membantu untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya tentang kemiskinan yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dan juga diharapkan penelitian ini menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendetail dan juga terperinci ataupun studi kasus terhadap Baznas ataupun DJP dan juga kementerian sosial dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Praktisi

Untuk pelaku penghimpun dana seperti Baznas diharapkan akan lebih efisien dalam mengelola dananya untuk kemaslahatan umat dan bangsa dan diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan untuk Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan dapat mampu mengoptimalkan penghimpunan dananya untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia yaitu kemiskinan sama halnya dengan kementerian sosial.

c. Regulator/Pemerintah

Diharapkan untuk pemerintah Indonesia dapat lebih mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia ini sebagai contoh diharapkan agar mendukung program ini dengan membuat peraturan yang mendukung memaksimalkan penghimpunan dana Lembaga-lembaga penghimpun dana untuk mengentaskan kemiskinan khususnya ZIS, Pajak, dan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Kementerian Sosial.